

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, karena setiap penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1, 2004). Dalam konteks ini, Sistem Pembendaharaan Daerah berperan sebagai mekanisme yang menjamin setiap transaksi keuangan berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik (Sumarti et al., 2022). Salah satu instrumen penting dalam pembendaharaan daerah adalah SPP-GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang), yang berfungsi sebagai prosedur pengajuan penggantian uang tunai yang telah dikeluarkan oleh pejabat atau pegawai untuk kepentingan kegiatan dinas (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2012, 2012).

Prosedur pengajuan SPP-GU membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait administrasi keuangan, karena setiap dokumen yang diajukan harus melalui tahap verifikasi oleh bendahara pengeluaran, termasuk pengecekan kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan kesesuaian dengan anggaran yang tersedia (Situngkir, 2021). Ketidaktepatan dalam pengajuan atau ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi yang merugikan instansi. Hal ini menegaskan pentingnya penguasaan prosedur SPP-GU bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Sistem Pembendaharaan Daerah.

Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan salah satu instansi yang memiliki beragam kegiatan operasional, mulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi

pariwisata, hingga pembinaan ekonomi kreatif. Setiap kegiatan tersebut memerlukan pendanaan yang dikelola secara profesional melalui mekanisme SPP-GU (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2012, 2012). Oleh karena itu, prosedur pengajuan SPP-GU tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi juga bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata (Mardiasmo, 2021).

Bagi mahasiswa D3 Keuangan Negara, memahami prosedur SPP-GU adalah bagian dari penguasaan kompetensi pembendaharaan daerah. Dengan mempelajari mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana, mahasiswa dapat mengaitkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik nyata di lapangan (Segah, 2020). Selain itu, pemahaman ini juga meningkatkan kemampuan analisis dalam menilai efisiensi dan kepatuhan administrasi keuangan daerah, yang menjadi bagian dari standar kompetensi lulusan program studi Keuangan Negara.

Selain aspek teknis, pengelolaan SPP-GU juga menuntut mahasiswa untuk memahami aspek hukum dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi ketentuan mengenai batasan penggunaan dana, dokumen yang sah sebagai bukti pertanggungjawaban, hingga mekanisme audit internal (Mir & Sutiyono, 2020). Pemahaman regulasi ini menjadi penting agar proses pengajuan dan pencairan SPP-GU tidak menimbulkan risiko hukum bagi instansi maupun pegawai yang bersangkutan.

Kegiatan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengalami secara langsung proses pengajuan SPP-GU. Mulai dari tahap penyusunan dokumen, pengajuan ke bendahara pengeluaran, hingga pencairan dana, mahasiswa dapat mengamati tantangan dan kendala yang mungkin

terjadi di lapangan (Sumarti et al., 2022). Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga membentuk keterampilan profesional yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan SPP-GU memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang, mahasiswa dapat memahami secara langsung penerapan sistem pembendaharaan daerah, khususnya dalam proses pengajuan dan pencairan dana melalui mekanisme SPP-GU. Pengalaman ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mahasiswa terhadap praktik pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan peraturan dan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan magang yaitu ***“Prosedur Pengajuan Spp-Gu (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) Pada Dinas Pariwisata Kota Padang”*** sebagai bentuk kajian terhadap implementasi sistem pembendaharaan daerah di instansi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan magang ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pada dinas pariwisata kota Padang?
2. Apa saja tahapan dan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pada Dinas Pariwisata Kota Padang?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengajuan SPP-GU pada Dinas Pariwisata Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pengajuan SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) pada Dinas Pariwisata Kota Padang.
2. Mempelajari tahapan administrasi dan persyaratan dokumen dalam proses pengajuan dan pencairan SPP-GU.
3. Menganalisis kendala dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam proses pengajuan SPP-GU di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Padang serta menghubungkan teori pembendaharaan daerah yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Tugas Akhir yang diharapkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Keuangan Negara pada instansi publik, khususnya mengenai prosedur pengajuan surat permintaan pembayaran Ganti uang. Selain itu, penulisan ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, penulis, maupun mahasiswa yang ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait perbendaharaan daerah khususnya bendahara pengeluaran.

2. Bagi instansi tempat magang, Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam memperbaiki pengelolaan dana daerah melalui mekanisme SPP-GU. Temuan penulis ini dapat dijadikan dasar evaluasi untuk meminimalisasi kendala administratif dan menjadi masukan atau rekomendasi dari sudut pandang akademis untuk mendukung penguatan tata Kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Bagi Penulis, ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang keuangan negara. Selain itu, penulisan tugas akhir ini juga menjadi pengalaman berharga dalam melakukan analisis prosedur administratif perbendaharaan daerah, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Padang, selama 40 hari kerja, yakni dari tanggal 05 Januari sampai dengan 04 Maret 2026, yang beralamat di Jl. Jl. Gandaria No. 56, Kel. Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II ini membahas konsep dan teori yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai konsep SPP-GU, Perbendaharaan daerah, serta pengembangan standar operasional administrasi keuangan daerah. Landasan teori yang digunakan mengacu pada literatur yang relevan dan valid, baik berupa buku teks, buku ajar, maupun jurnal ilmiah.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab III ini menjelaskan tentang Gambaran umum Dinas Pariwisata Kota Padang yang menguraikan tentang latar belakang instansi ini.

BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab IV Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, alur kerja pengajuan SPP-GU mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pencairan dana, dokumen kelengkapan SPP-GU, serta identifikasi titik lemah dan potensi perbaikan dalam sistem perbendaharaan daerah. Seluruh pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup dari tugas akhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-

saran yang dianggap penting sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya memperbaiki sistem administrasi perbendaharaan.

